

## Kampung Melayu Siaga Banjir Susulan akibat Luapan Sungai Ciliwung

JAKARTA (IM) - Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, tetap bersiaga terhadap kemungkinan banjir susulan agar dapat menyiapkan langkah antisipasi ketika musibah itu kembali merendam RW 004 dan RW 005 Kebon Pala akibat luapan Kali Ciliwung.

Lurah Kampung Melayu, Angga Harjuno di Jakarta, Senin (15/8), mengatakan, saat ini banjir yang merendam permukiman warga Kebon Pala sejak pukul 04.00 WIB tersebut telah surut.

"Mulai surut pukul 09.30 WIB. Namun karena air Kali Ciliwung masih tinggi, jadi benar-benar kering pukul 12.30 WIB," kata Angga.

Angga menambahkan, bahwa tidak ada warga Kebon Pala yang mengungsi akibat banjir karena luapan

Kali Ciliwung tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menyiagakan petugas gabungan hingga posko untuk dijadikan tempat pengungsian bagi warga jika diperlukan.

"Tidak ada pengungsi. Namun kami tetap siaga banjir," ujar Angga.

Sebelumnya tinggi muka air di Bendungan Katulampa, Bogor, sempat berstatus siaga dua, pada Minggu (14/8) malam. Pos pemantauan mencatat, tinggi muka air Katulampa berada di angka 180 sentimeter. Hal itu membuat warga di Kebon Pala bersiaga dengan datangnya banjir akibat luapan Kali Ciliwung.

Air kiriman dari Katulampa itu kemudian meluap hingga membanjiri permukiman warga di Kebon Pala sekitar pukul 04.00 WIB. ● yan

## Pemprov DKI Tepis Kabar ASN Diwajibkan Nonton Jakarnaval

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menampik wacana pihak dia yang mewajibkan pegawai Pemprov DKI Jakarta untuk menghadiri ajang Jakarnaval di Jakarta international E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Minggu (15/8). Menurut dia, para penonton yang datang, berasal dari luar lingkup Pemprov DKI Jakarta.

"Nggak kita wajibkan. Kalo ASN diwajibkan, nanti penuh nggak cukup tempatnya," kata Riza kepada awak media kemarin malam di Ancol.

Dia melanjutkan, alasan memilih Ancol dan eks sirkuit Formula E sebagai lokasi Jakarnaval karena adanya tribun yang besar dan memadai dan bisa mengumpulkan banyak penonton. Tak hanya itu, pemilihan lokasi tersebut, diklaimnya juga ingin menunjukkan bahwa pihak dia memiliki Ancol sebagai tempat desinasi wisata terbaiknya.

"Saya kira sesuatu yang

positif, kalau di Balai Kota (2019) kemarin itu yang hadir cuman di pinggirannya saja," jelas dia.

Sementara itu, salah satu pegawai Pemprov DKI Jakarta yang enggan disebutkan namanya, mengaku diwajibkan datang ke Jakarnaval. Kedatangannya sejak siang itu, dinilai tugas dari salah satu dinas.

Ditanya kesan saat menonton, dia mengaku belum mendapatkan yang dicarinya. Meski demikian, hal yang paling disorotnya adalah pertunjukan musik dan karnaval serta parade.

"Baru sampai nih jam tiga tadi. Datang karena tugas dari dinas. Ada suratnya juga," kata dia di lokasi, kemarin.

Dia mengaku, pada awalnya datang bersama 10 orang lainnya. Meski demikian, memilih berpacaran dan mengunjungi lokasi yang diinginkan. "Lokasinya ya cukup hangat ya, atau panas ya," jelas dia. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



### KENAIKAN TARIF OJEK ONLINE DITUNDA

Ojek daring mengangkut penumpang melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin (15/8). Kementerian Perhubungan menunda pelaksanaan aturan tentang tarif ojek daring yang semula akan diterapkan pada 14 Agustus 2022 menjadi 28 Agustus 2022 yang bertujuan memperpanjang masa sosialisasi terhadap tarif baru kepada para pemangku kepentingan karena moda angkutan daring berkaitan dengan masyarakat luas.

## Wagub Bakal Evaluasi Rumah Dinas Lurah di Jakpus yang Jadi Gudang

Memang ada rumah dinas yang seharusnya diisi oleh lurah. Mungkin karena satu dua hal, di antaranya lurah sudah ada tempat tinggal lain. Jadi rumah dinas itu tidak difungsikan sebagai tempat tinggal, tapi difungsikan sementara menyimpan barang-barang yang ada inventarisnya.

JAKARTA (IM) - Sejumlah rumah dinas (rumah dinas) lurah di Jakarta Pusat

dijadikan gudang penyimpanan barang bekas. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza

Patria mengatakan barang-barang yang diletakkan di dalam rumah dinas lurah itu merupakan inventaris milik kelurahan.

"Memang ada rumah dinas yang seharusnya diisi oleh lurah. Mungkin karena satu dua hal, di antaranya lurah sudah ada tempat tinggal lain. Jadi rumah dinas itu tidak difungsikan sebagai tempat tinggal. Tapi difungsikan untuk sementara menyimpan barang-barang yang ada inventarisnya. Memang inventaris yang ada milik kelurahan itu ya tugas kelurahan," kata Riza saat

ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Riza memandang sudah menjadi tugas pemerintah daerah melakukan inventarisasi atau pendataan barang miliknya. Hal inilah yang menjadi alasan rumidn tersebut difungsikan untuk penyimpanan barang.

"Kalau milik Pemprov ya tugas Pemprov. Harus dijaga, dirawat dipastikan dalam kondisi baik. Dan harus didata, tidak boleh hilang. Itulah sebabnya makanya rumah dinas yang kosong itu dimanfaatkan," ujarnya.

Kendati begitu, Riza mengakui rumidn dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan sebagai rumah tinggal. Atas kejadian ini, pihaknya bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Ke depan akan dilakukan evaluasi. Kita akan fungsikan rumah dinas tersebut sesuai dengan peruntukannya. Karena peruntukan rumah dinas lurah ya bukan untuk menyimpan barang-barang bekas," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah rumah dinas untuk lurah di Jakarta Pusat (Jakpus) berubah fungsi menjadi gudang untuk barang bekas. Ada juga rumah dinas lurah yang

tidak ditempati.

Salah satu penghuni di rumah dinas Kelurahan Kramat, Johar Baru, Jakpus, Roisah (45), mengaku sudah menempati rumah dinas tersebut selama lima tahun.

"Di tinggal bersama suami, yang bekerja sebagai petugas penangan prasarana dan sarana umum (PPSU), untuk menjaga barang-barang yang ada di dalam rumah dinas.

"Di dalam banyak barang bekas, seperti AC, lemari besi. Saya dan suami disuruh menjaga rumah ini," kata Roisah, beberapa waktu lalu.

Roisah mengaku lurah lebih memilih tinggal di rumah pribadi dibanding di rumah dinas. Rumah dinas di Kelurahan Kramat itu terlihat dipenuhi barang-barang tidak terpakai, bahkan bangkai motor juga terparkir di halaman depan.

Di tempat terpisah, salah satu warga berinisial RZ mengaku rumah dinas di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Tanah Tinggi tidak pernah ditempati lurah.

Sementara itu, keadaan rumah dinas Lurah Kebon Melati, Tanah Abang, juga menjadi lahan parkir motor bak sampah roda tiga di halaman depan. ● yan



FOTO: ANT

### TAMAN REKREASI TEBET ECO PARK DIBUKA KEMBALI

Warga bermain di area Tebet Eco Park, Jakarta, Senin (15/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kembali Tebet Eco Park setelah ditutup sementara sejak Juni 2022 untuk perbaikan dan perawatan fasilitas taman.

## HUT RI, Ancol Bagikan 1.945 Tiket Gratis Melalui [ancol.com](http://ancol.com)

JAKARTA (IM) - Anak usaha PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., PT Taman Impian Jaya Ancol, menyediakan 1.945 tiket gratis pada Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia (HUT ke-77 RI), Rabu (17/8) besok. Tiket ini tersedia dalam dua kali waktu penjualan secara daring melalui situs [www.ancol.com](http://www.ancol.com).

Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Budi Aryanto mengatakan, perusahaan menyediakan penjualan tiket gratis untuk menyambut HUT ke-77 RI agar pengunjung bisa menggunakan tiket untuk pilihan kunjungan dari 18-31 Agustus 2022. Budi menuturkan, pengunjung bisa mendapatkan tiket gratis masuk Ancol di situs [www.ancol.com](http://www.ancol.com) pada 17 Agustus.

Kemudian, pengunjung wajib mengklaim dan reservasi pada tanggal tersebut untuk merayakan HUT ke-77 RI. Satu orang calon pengunjung hanya dapat mengklaim

1 tiket gratis maksimal dua tiket.

"Kami adakan program Tiket Gratis masuk Ancol Taman Impian dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk bisa menikmati rekreasi di kawasan wisata terbesar di Indonesia ini secara gratis," kata Budi Aryanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/8).

Budi menambahkan, tiket gratis hanya tersedia dalam dua waktu berikut, yakni pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 19.00-21.00 WIB, masing-masing waktu disediakan sebanyak 1.945 tiket, sehingga total tiket gratis yang tersedia pada 17 Agustus sebanyak 3.890 lembar. Tiket gratis berlaku untuk individu, belum termasuk kendaraan dan tiket masuk ke unit rekreasi (Dufan, Sea World, Samudra, Atlantis). ● yan

## Bapemperda DPRD DKI Setujui Pencabutan Perda Tata Ruang

JAKARTA (IM) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyetujui pencabutan Perda Tata Ruang pada hari ini. Ketua Bapemperda DPRD DKI, Pantas Nainggolan akan melaporkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencanan Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) itu ke rapat pimpinan dewan.

"Dengan disetujuinya Raperda, maka selanjutnya Bapemperda akan melaporkan ke Rapim DPRD," kata dia dalam rapat Bapemperda, Senin (15/8).

Persetujuan itu diberikan Bapemperda DPRD DKI usai rapat dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) hari ini. Rapat membahas kelanjutan pencabutan Perda

1/2014 setelah memastikan Raperda tidak bertentangan dengan pergub yang telanjut dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan. Dalam rapat itu, Dinas Citata DKI telah memperlihatkan ringkasan isi Pergub baru tentang RDTR. Pantas menanyakan kepada anggota dewan apakah menyetujui pencabutan Perda 1/2014. Anggota dewan yang hadir sebanyak empat orang menyatakan setuju.

Menurut Pantas, proses pencabutan Perda 1/2014 selanjutnya akan dibahas dalam Rapim sebelum disahkan melalui rapat paripurna DPRD DKI. "Akan dilanjutkan ke paripurna yang dijadwalkan Bamus (Badan Musyawarah)," ujar politikus PDIP ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyerahkan Raperda tentang Pencabutan Perda 1/2014 pada Senin, 1 Agustus

2022.

Anies memohonkan pencabutan Perda 1/2014 lantaran sudah terbit Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) DKI. Bapemperda kemudian membahas Raperda tersebut. Sebenarnya pemerintah DKI telah menggaungkan revisi Perda 1/2014 sejak 2019. Namun, Anies menerbitkan Pergub 31/2022 karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah format kebijakan RDTR-PZ DKI. Undang-undang ini menyebutkan, kebijakan tata ruang cukup diatur dalam peraturan kepala daerah.

Untuk itulah, Anies meminta pencabutan Perda Tata Ruang yang lama agar tidak ada aturan RDTR-PZ yang tumpang tindih. ● yan

## Wagub: Hibah Situ Rawa Kalong ke Pemkot Depok, Masih Proses

DEPOK (IM) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum menyerahkan Hibah Situ Rawa Kalong, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar tengah mengurus penghamban tersebut. "Bukan berarti tidak akan dihibahkan, tapi ada proses lain yang masih dalam proses," kata Uu saat ditemui wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (15/8).

Kendati demikian, Uu enggan menjelaskan secara terperinci proses yang dimaksudnya. Dia hanya menekankan, sejauh ini Pemprov Jabar masih mengurusnya. "Karena semua ada tahap-tahapan tertentu, karena itu hibah," ujar Uu.

Berkaitan dengan fasilitas panggung apung yang belum dibuka untuk umum, Uu menyebutkan, Situ Rawa Kalong masih dalam tahap pemeliharaan oleh Pemprov Jabar.

"Nanti kan bertahap semuanya, yang jelas masih dalam pemeliharaan," kata Uu.

Uu meminta masyarakat tidak berprasangka negatif terhadap pemerintah karena panggung apung tersebut

belum dibuka meski sudah diresmikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. "Pokoknya masyarakat jangan negatif terhadap pemerintah. Seluruh kegiatan dan keputusan pemerintah demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan masyarakat," kata Uu.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Situ Rawa Kalong, Nurdin mengungkapkan, Pemprov Jabar belum menyerahkan Hibah Situ Rawa Kalong kepada Pemkot Depok.

Pasalnya, revitalisasi Situ Rawa Kalong sepenuhnya dilakukan oleh Pemprov Jabar. "Kemarin waktu kunjungan Gubernur itu kan baru peresmian, makanya nanti akan ada proses administrasi hibah terkait sarana prasarana tersebut. Nanti setelah diserahkan ke Pemkot Depok, dikelola oleh Depok, nanti baru (bisa digunakan)," kata Nurdin saat dihubungi, Rabu (10/8).

Nurdin belum dapat memastikan kapan Situ Rawa Kalong dihibahkan kepada Pemkot Depok. "Kalau hasil komunikasi, secepatnya (dihibahkan) dari SDA Jabar tuh, tetapi kami enggak tahu pasti sampai berapa bulan prosesnya," kata Nurdin. ● yan



FOTO: ANT

### ABAIKAN KESELAMATAN DIRI

Warga menyeberang jalan raya tanpa menggunakan jembatan penyeberangan di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta, Senin (15/8). Menyeberang jalan raya tanpa menggunakan jembatan penyeberangan dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain.

#### PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN SAHAM MELALUI KONVERSI UTANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

PT Bangun Megah Djaya Bersama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bekasi ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan telah menerima pengambilalihan 2.250 saham melalui konversi utang menjadi saham oleh PT Saffron Jaya Andalana yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pemegang saham pengendali Perseroan menjadi PT Saffron Jaya Andalana.

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Bekasi, 16 Agustus 2022

Direksi